



Linimasa Demokrasi

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA
KELAS 11

MODUL TEMA 7



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018



Linimasa Demokrasi

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA
KELAS 11

MODUL TEMA 7



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XI
Modul Tema 7 : Linimasa Demokrasi

- **Penulis:** Yetty Purdiantari
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018

iv+ 44 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	2
Pengantar Modul	2
UNIT 1: KERUKUNAN DALAM KELUARGA	4
URAIAN MATERI	4
A. Manfaat Kerukunan di Rumah	4
B. Perilaku yang mencerminkan dan .. tidak mencerminkan kerukunan di rumah	10
PENUGASAN 1	14
PENUGASAN 2	16
LATIHAN SOAL	16
UNIT 2: KERUKUNAN DI SATUAN PENDIDIKAN	17
URAIAN MATERI	17
A. Manfaat Kerukunan Di Satuan Pendidikan	17
B. Perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan .. kerukunan di Satuan Pendidikan.....	20
PENUGASAN 1	24
PENUGASAN 2	25
LATIHAN SOAL	26
UNIT 3: KERUKUNAN DI MASYARAKAT	27
URAIAN MATERI	27
A. Manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat	27
B. Perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan .. persatuan dan Kesatuan di Masyarakat	31
PENUGASAN 1	33
PENUGASAN 2	34
Rangkuman	35
Latihan Soal	36
Kunci Jawaban	37
Penilaian	38
Kriteria Pindah Modul	40
Daftar Pustaka	41
Sumber Gambar	42

Meyibak Peristiwa di Sekitar

Petunjuk Penggunaan Modul

Warga belajar yang budiman, selamat mempelajari Modul 7 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tingkatan V setara kelas XI dengan judul Linimasa Demokrasi. Sebelum mempelajari modul 7, bacalah petunjuk berikut ini :

- Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan
- Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan
- Setiap unit modul dilengkapi dengan latihan yang berisi penugasan yang dikerjakan secara individu.
- Penugasan menjadi alat ukur tingkat penguasaan Anda setelah mempelajari seluruh materi dalam modul ini.
- Jika Anda belum menguasai 75 dari setiap unit, maka Anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini.
- Tanyakan dan konsultasikan pada Tutor Anda setelah penugasan dinilai oleh tutor Anda.

Cara mempelajari modul ini dapat dilakukan secara mandiri, tutorial, maupun tatap muka dengan bimbingan Tutor. Agar Anda dapat memahami materi yang disajikan pada unit 7.1 sampai dengan unit 7.3, maka bacalah dengan seksama dari awal sampai akhir secara berurutan. Di dalam setiap unit, ada beberapa latihan yang dapat dikerjakan secara mandiri

atau bersama teman Anda. Pada akhir uraian materi, Anda diminta mengerjakan tugas-tugas secara individual. Dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, silahkan menghubungi Tutor untuk meminta bimbingan.

Jangan lupa, tugas yang telah dikerjakan segera dikumpulkan pada Tutor untuk dikoreksi dan diklarifikasi hasil kerja Anda.

Pada bagian akhir modul disajikan penilaian untuk mengukur kompetensi Anda Dalam penilaian kompetensi tersebut dengan menjawab pernyataan yang disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk dinilai. Selanjutnya Tutor akan melakukan penilaian berbasis modul untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam menerapkan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menguraikan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia
3. mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia

Pengantar Modul

Hampir setiap kali kita mendengar kata-kata demokrasi bahkan mengucapkannya ketika sedang berbincang-bincang dengan keluarga, teman maupun masyarakat di lingkungan kita tinggal. Apakah kita sudah benar-benar memahami apa itu demokrasi dan perbuatan demokratis itu ?

Modul 7 LINIMASA DEMOKRASI ini akan membantu Anda untuk mengetahui hakikat demokrasi, dinamika demokrasi di Indonesia sampai pada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia yang dilengkapi dengan penugasan untuk melatih pemahaman Anda setelah mempelajari setiap unit modul.

No	Unit	Materi	Penugasan
7.1	Bela Demokrasi, Bela Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Hakikat Demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal
7.2	Risalah Perjalanan Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Menguraikan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia dalam bentuk tulisan
7.3	Demokrasi sebuah pilihan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat komitmen tertulis untuk membangun kehidupan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sesuai format yang disiapkan.

 Mari Belajar

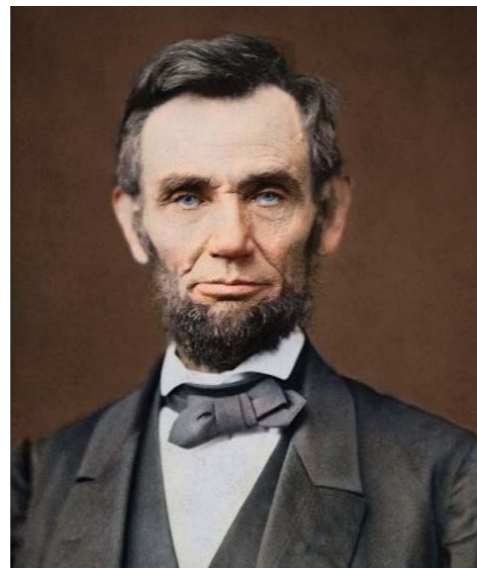
Warga belajar yang budiman, demokrasi merupakan istilah yang sangat akrab di telinga kita, karena negara kita menganut sistem demokrasi di berbagai bidang kehidupan. Namun apakah kita sudah benar-benar memahami demokrasi? Berikut ini akan diuraikan tentang hakikat demokrasi.

A. Makna Demokrasi

Apakah Anda ketahui tentang demokrasi? Barangkali Anda pernah memiliki pemahaman yang berbeda dengan teman Anda tentang demokrasi. Teman Anda memiliki pengertian yang berbeda dengan Anda karena sudut pandang yang digunakan berbeda dengan Anda, misalnya, teman Anda menggunakan sudut pandang politik, Anda menggunakan sudut pandang sosial. Nah, untuk memahami tentang demokrasi, berikut ini penjelasannya.

Istilah “demokrasi” pada awalnya berasal dari sebuah wilayah Yunani Kuno yang dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Istilah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti masyarakat (rakyat) dan “kratos” yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakekatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.



Gambar 7.1.1 gambar Abraham Lincoln:

Sumber : <https://i.pinimg.com/originals/71/5f/a5/715fa5b3b1b2614540c48cd68dd5342c.jpg>

Makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara didasarkan pada kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintah.

B. Ciri-ciri dan Prinsip Demokrasi

Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat (*law enforcement*) dan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2008) mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Apakah demokrasi Indonesia hanya berlaku sebagai sistem politik saja? Tentu saja tidak, demokrasi kita diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Muhammad Hatta, menekankan pentingnya demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak hanya menekankan pada aspek politik melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, namun demokrasi juga harus bermakna di bidang kesejahteraan rakyat. Jadi sistem ekonomi yang kita anut seharusnya bertumpu pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, tidak hanya kesejahteraan segelintir orang dan golongan, dan tidak disandarkan pada prinsip ekonomi pasar bebas yang eksploitatif atas kaum marjinal. (Adyaksa, 2012).

Seperti kita ketahui Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia, beliau menyusun gagasannya mengenai demokrasi yang kemudian dipatrikan dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 7.1.2. gambar Muhammad Hatta Bapak Demokrasi Ekonomi, Sumber : <https://rullytrichayono.files.wordpress.com/2016/08/hatta.jpeg>

Dalam paham sosialisme barat, individualisme ekonomi dilawan dengan menawarkan campur tangan negara dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Bagi Hatta, individualisme Barat dilawan dengan asas kekeluargaan, yaitu kebersamaan (*kolektivisme*) yang bersumber dari tradisi kehidupan masyarakat asli di Indonesia. Dalam wujudnya yang konkrit, bagi Hatta, “asas kekeluargaan” itu adalah koperasi. Dengan demikian Hatta menyodorkan koperasi sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi (Suleman, Zulfikri, 2010)

C. Demokrasi di Indonesia

Sebagai warga masyarakat, pernahkan Anda terlibat dalam kegiatan pemilihan ketua RT, pemilihan pengurus takmir masjid, atau pemilihan pengurus lingkungan ? Biasanya kegiatan diawali dengan pertemuan untuk menyepakati syarat dan tata cara pemilihan, kemudian mengajukan bakal calon dan menyepakati waktu pemilihan dan hal-hal di luar perkiraan dengan musyawarah dan mufakat. Berawal dari demokrasi yang sederhana inilah kemudian dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia modern, yang meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Achmad Sanusi (2006) mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau

sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
4. Demokrasi dengan *rule of law*. Hal ini mempunyai empat makna penting. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separation of power*), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (*check and balances*).
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
9. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (*welfare state*) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

LATIHAN 7.1.1

Dari beberapa pandangan tentang demokrasi di atas apakah demokrasi menurut pemahaman Anda ? Tulis dalam secarik kerta dan diskusikan dengan teman Anda !

Dari berbagai pandangan tentang demokrasi, pada hakikatnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan dengan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Untuk mengetahui dinamika perjalanan demokrasi di Indonesia, unit 7.2. Risalah perjalanan Demokrasi akan menguraikannya untuk Anda.

PENUGASAN 7.1.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 7.1 Anda diminta mengidentifikasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal Anda

Tujuan

- ✓ Dapat mengidentifikasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal

Media

- ✓ Kertas folio atau *WhatsApp* atau *e-mail*.

Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 7.1: **Bela Demokrasi, Bela Rakyat**
- ✓ Identifikasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal Anda dan tuliskan dalam bentuk laporan dengan sistematika minimal sebagai berikut:
 - Pendahuluan
 - A. Latar belakang
 - B. Tujuan
 - Pembahasan (Pelaksanaan demokrasi di lingkungan
 - Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi
- ✓ Caranya: cermati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Anda, apakah itu kegiatan gotong royong, pertemuan RT, Ronda, Karangtaruna pertemuan PKK, dst. Kemudian temukan dan kenali apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

- ✓ Tulis atau ketik di kertas HVS Folio
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.

PENUGASAN 7.1.2

Setelah tuntas mempelajari materi unit 7.1 tentang Bela Demokrasi Bela Rakyat, maka untuk menguji kompetensi Anda silakan kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Uraian

Jawablah soal latihan berikut ini dengan benar !

1. Jelaskan makna dari demokrasi !
2. Bagaimana ciri demokrasi ?
3. Apa saja prinsip demokrasi ?
4. Jelaskan 4 makna penting demokrasi dengan *rule of law* !

UNIT 2

Risalah Perjalanan Demokrasi

Mari Belajar

Sudah sejak awal kemerdekaannya bangsa Indonesia menyatakan komitmennya untuk mewujudkan negara demokrasi. Setiap pelaksanaan model demokrasi memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu. Upaya untuk mewujudkan komitmen itu mengalami pasang surut sebagaimana dipaparkan berikut ini:

A. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945 – 1949

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 - 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat dengan fungsi utamanya ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan.



Gambar 7.2.1 gambar partai-partai pasca kemerdekaan, Sumber : <https://d220hvstrn183r.cloudfront.net/attachment/350PNI.large> - <https://4.bp.blogspot.com/-Xh1NiMdnGLM/awal%2Bpartai%2Bpolitik.png>
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/2/2d/Parindra.jpg>

Karena keadaan yang tidak mengizinkan, Pemilihan Umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Meskipun tidak banyak

catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya.

Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan.

Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. *Ketiga*, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

B. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. *Pertama*, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan juga berubah dari presidensiil menjadi quasi parlementer. *Kedua*, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Cara kerja sistem pemerintahan Parlementer:

1. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Partai politik yang menguasai mayoritas DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintahan negara;
2. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet dibentuk dengan bertanggung jawab kepada DPR;

3. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri;
4. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas;
5. Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya dan menteri, para menteri atau kabinet yang diberi mosi tidak percaya harus mengundurkan/membubarkan diri.
6. Jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru;
7. Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru, DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum; (Bambang Suteng, dkk, 2007)

Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer adalah sebagai berikut.

1. Masa kerja rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan jangka panjang pemerintah yang tidak dapat terlaksana selama masa 15-8-1950 sampai dengan tahun 1959 telah terjadi tujuh kali pembentukan kabinet. Itu berarti usia kerja rata-rata tiap kabinet kurang dari 1 ¼ tahun
2. Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata pasca peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu sebagian anggota ABRI condong ke kabinet Wilopo, sebagian lagi condong ke Presiden Soekarno.
3. Telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dan tokoh Masyumi, Isa Anshory, mengenai penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami tentang apakah akan merugikan umat beragama lain atau tidak.
4. Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di masyarakat.
5. Kebijakan beberapa Perdana Menteri yang cenderung mementingkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.
6. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti pemberontakan PRRI (di Sumatera) dan Permesta (di Sulawesi).

(Bambang Suteng, dkk, 2007)

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat

sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan *Dekret Presiden 5 Juli 1959*. Dalam Dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai *Demokrasi Terpimpin*. Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.



Gambar 7.2.2. gambar masa demokrasi terpimpin, Sumber : <https://greateedu.co.id/storage/operator/uploads/4/1546924549-Demokrasi%20terpimpin.jpg>- <https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2017/01/kabinet-satu.jpg>- <https://peterkasenda.files.wordpress.com/2016/06/kabinet-dwikora.jpg?w=640>

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah:

Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia.

Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrument politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden.

Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai

keberanian untuk menentanginya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan Sosialis.

Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah seperti misalnya *Harian Abadi* dari Masyumi dan *Harian Pedoman* dari PSI.

Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.



Gambar 7.2.3. gambar peristiwa TRITURA dan Supersemar, Sumber : <https://rumus.co.id/wp-content/uploads/2018/11/Isi-Tritura-Tokoh-Tujuan-Latar-Belakang-Plopor.png> - <https://asset.kompas.com/crop/0x0:972x648/750x500/data/photo/2018/06/07/1594369665.JPG>

Demokrasi Terpimpin berakhir setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI yang diikuti berbagai peristiwa lainnya. Dalam menanggapi aksi Demo Mahasiswa yang terkenal dengan tuntutanannya, yakni TRITURA, presiden Soekarno memberikan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan, demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998

Visi utama pemerintahan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep *Demokrasi Pancasila* yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan karena berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat.



Gambar 7.2.4. gambar-gambar Soeharto dalam berbagai kesempatan, Sumber : <https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/09/25/soeharto-nasution-59c8a0b163a8e6104d4127a2.jpg?t=o&v=700> <https://cdn.klimg.com/merdeka.com-ii/w/news/2017/10/18/899206/670x335/as-buka-dokumen-rahasia-1965-sebut-suharto-perintahkan-pembantaian-massal.jpg> https://mmc.tirto.id/image/otf/500x0/2018/12/09/soeharto-pemilu-1977--antara_ratio-16x9.jpg

Selama orde baru, pemerintah berhasil menyelenggarakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia itu Partai Golongan Karya (Golkar) selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Presiden Soeharto secara resmi dilantik MPR sbgai presiden tahun 1968 untuk masa jabatan 5 tahun dan kemudian dilantik kembali sebagai presiden oleh MPR secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1998.

Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati/walikota, camat dan

kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Rekrutmen politik bersifat tertutup karena hanya proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, di Indonesia, sistem rekrutmen tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang.

Pengisian jabatan di lembaga tinggi negara, seperti MA, BPK, DPA, dan jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Pemilu pada masa Orde Baru telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Kualitas pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi karena tidak melahirkan persaingan yang sehat.

Kebebasan pers, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparatus keamanan) memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-Undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dari uraian di atas, pelaksanaan Demokrasi Pancasila tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka.

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 - sekarang

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri.

Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah,

antara lain *reshuffle* (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.



Insertkan gambar Presiden soeharto menyatakan mundur, Sumber : http://images.aksi.id/posts/1/2018/2018-05-21/50b9b26d01c9c9c17f46a05160983f45_1.jpg - https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/101A8/production/_101306956_suhartoresign_habibie.jpg

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia.

Pada masa inilah kembali diwujudkan beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Pertama*, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. *Kedua*, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Presiden Habibie membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi upolitiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya.

Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Serahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. *Pertama*, Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya dilembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota) dipilih

langsung oleh rakyat. *Kedua*, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. *Ketiga*, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga Negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. *Keempat*, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.

Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1999 diadakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden RI dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid dengan didampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden dan dilantik pada 30 Oktober 1999. Pada perkembangan politik selanjutnya, MPR mencabut mandatnya, sehingga Abdurrahman Wahid harus melepaskan kursi kepresidenannya dan MPR bersidang kembali pada tanggal 23 Juli 2001. Hasilnya Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi presiden dengan Hamzah Haz sebagai wakil presiden untuk periode 2001-2004.

Kemudian pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden RI didampingi oleh Jusuf Kalla untuk periode tahun 2004-2009. Dan pada pemilu 2009, terpilih kembali Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presiden Boediono untuk periode 2009-2014. Pemilihan umum selanjutnya untuk periode 2014-2019 masih menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung dan terpilih sebagai presidennya, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.

Di masa reformasi, kebebasan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah semakin terbuka. Demokrasi tidak sekedar menjadi identitas, tetapi diupayakan diterapkan secara total oleh pemerintah. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya dapat diterapkan di seluruh aspek kehidupan.

PENUGASAN 7.2.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 7.2, Anda diminta menuliskan uraian periodisasi perkembangan demokrasi Indonesia tersebut

Tujuan

- ✓ Dapat menguraikan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia dalam bentuk tulisan

Media

- ✓ Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 7.2: **Risalah Perjalanan Demokrasi**
- ✓ Cari dan baca materi dari sumber lain (internet/buku yang relevan)
- ✓ Uraikan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia dalam bentuk tulisan
- ✓ Caranya: Tulis secara urut periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan urutan
 - waktu/masa,
 - kondisi masa itu,
 - kelemahan/kelebihan sistem demokrasi yang dianut.
- ✓ Tulis atau ketik di kertas HVS Folio
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor. Pilihan

PENUGASAN 7.2.2

Setelah tuntas mempelajari materi unit 7.2 tentang Risalah Perjalanan Demokrasi, maka untuk menguji kompetensi Anda silakan kerjakan soal latihan berikut ini.

Ganda

Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberi silang (X) pada satu pilihan jawaban berikut ini !

1. Lembaga yang berwenang membatasi kekuasaan presiden untuk menggantikan parlemen pada masa awal kemerdekaan adalah ...
 - A. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
 - B. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
 - C. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
 - D. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
 - E. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

2. Pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara ...
 - A. Kesatuan
 - B. Serikat
 - C. Parlementer
 - D. Republik
 - E. Presidensiil
3. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Cara kerja ini menunjukkan sistem pemerintahan ...
 - A. Presidensiil
 - B. Parlementer
 - C. Republik
 - D. Kerajaan
 - E. Serikat
4. Dekrit presiden mengakhiri era demokrasi parlementer berdampak pada perubahan kehidupan politik nasional ke dalam sistem demokrasi ...
 - A. Pancasila
 - B. Parlementer
 - C. Terpimpin
 - D. Liberal
 - E. Konstitusional
5. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah
 - A. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan perdamaian dunia
 - B. Mewujudkan negara yang demokratis
 - C. Melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen
 - D. Kembali ke UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila
 - E. Melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara demokratis

UNIT 3

Demokrasi Sebuah Pilihan

Mari Belajar

6. Pemilihan umum pada masa orde baru dilakukan sebanyak enam kali, yaitu ...
 - A. 1970, 1973, 1985, 1987, 1992, dan 1997
 - B. 1970, 1977, 1985, 1987, 1991, dan 1997
 - C. 1971, 1975, 1985, 1987, 1992, dan 1997
 - D. 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997
 - E. 1972, 1976, 1978, 1987, 1992, dan 1997
7. Berikut yang **bukan** anggota dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) adalah...
 - A. PNI
 - B. NU
 - C. PKI
 - D. Masyumi
 - E. PDI
8. Lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid disebabkan oleh ...
 - A. Terjerat hukuman pidana
 - B. Dicabutnya mandat oleh MPR
 - C. Masa jabatan yang telah habis
 - D. Terlibat kaus yang merugukan negra
 - E. Mengundurkan diri karna sakit yang berkepanjangan
9. Visi Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal ...
 - A. 11 Mei 1989
 - B. 12 Mei 1989
 - C. 17 Mei 1989
 - D. 21 Mei 1989
 - E. 22 Mei 1989
10. Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI dan mengatur wakil presiden Habibie mnggunakan pasal ...
 - A. 5 UUD 1945
 - B. 6 UUD 1945
 - C. 7 UUD 1945
 - D. 8 UUD 1945
 - E. 9 UUD 1945

Di lingkungan tempat tinggal Anda, masiakah Anda melihat aktivitas gotong-royong seperti digambarkan dalam gambar di bawah ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi. Bahwa membangun Indonesia membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mencapai hasil yang diinginkan serta membangun komitmen dalam menjaga kebhinekaan agar tetap satu.



Gambar 7.3.1 Gotong royong , Sumber: <http://www.koranmadura.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG-201701240050.jpg> - https://manadopostonline.com/assets/images/news/PINDAH-RUMAH_19111603.jpg

Pelaksanaan demokrasi di masyarakat tercermin dalam kegiatan gotong royong, di dalam gotong royong terkandung nilai moral kebaikan dan hikmah yang sangat mulia. Gotong royong dan musyawarah sangat di perlukan oleh masyarakat karena pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan gotong royong dan musyawarah kita juga di ajarkan untuk menghormati pendapat orang lain dan saling toleransi.

Hal ini pula yang membuat kita dalam Kebhinekaan Tunggal Ika senasib sepenanggungan. Hal demikian bagian dari konsep nilai gotong royong dalam hubungan sosial di masyarakat kita. Nilai-nilai gotong royong lebih mempertegas situasi pengambilan keputusannya yaitu

melalui musyawarah mufakat. Contohnya, hampir tidak pernah terjadi pada saat membangun rumah (sambatan_bahasa Jawa), keputusannya ditentukan langsung oleh pemilik rumah, melainkan semua yang akan membangun duduk bersama untuk sepakat pekerjaan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Sehingga perilaku inilah yang mendasari masyarakat kita sejak dahulu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Oleh karenanya, jika kita konsisten dengan perilaku politik dalam berdemokrasi dengan berprinsip nilai Pancasila dan UUD 1945, maka kita harus menerapkannya dalam sikap politik musyawarah untuk mufakat.

LATIHAN 7.3.1

Nah, jika aktivitas ini masih terjadi di daerah Anda, apa yang manfaat gotong-royong menurut Anda? Diskusikan dengan teman tentang kegiatan gotong-royong di lingkungan Anda.

A. Membangun Kehidupan Demokratis di Indonesia

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik saja, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup yang demokratis. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku yang mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi.

Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.

Persamaan kedudukan di muka hukum

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyalakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

Distribusi pendapatan secara adil

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.

Kebebasan yang bertanggungjawab

Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul. Empat kebebasan ini merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga Negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.

Setelah Anda memahami karakteristik negara yang demokratis, coba Anda bayangkan jika Anda tidak diperlakukan sama di depan hukum, maka Anda tentunya merasa diperlakukan tidak adil sehingga kepercayaan Anda terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun atau bahkan tidak ada. Bayangkan pula apabila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat banyak yang menganggur, fakir miskin bertambah banyak jumlahnya dan semakin terlantar kehidupannya.

B. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi pancasila

Negara kita menganut sistem demokrasi di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan pertahanan keamanan. Nah, silahkan cermati ilustrasi berikut ini:



Gambar 7.3.2. Perwujudan demokrasi di berbagai aspek kehidupan

LATIHAN 7.3.2

Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sempurna? Tuliskan pendapat Anda dan diskusikan dengan teman Anda!

Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah.

Pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana) atau negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional yang dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Pada intinya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah. Oleh

karena itu setiap warga negara, termasuk Anda harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
5. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

C. Penerapan demokrasi di berbagai aspek kehidupan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, namun dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita temui perilaku yang tidak demokratis, misalnya berupa tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai perbedaan, tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah diputuskan. Berikut ini adalah contoh penerapan demokrasi di berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara:

1. Politik

Contoh penerapannya:

- partisipasi dalam pemilihan RT, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih
- memilih pemimpin secara cerdas
- mengikuti kegiatan berorganisasi
- berani menyatakan pendapat
- ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
- menghormati pendapat orang lain
- menghormati pemerintahan yang sah

2. Ekonomi

Contoh penerapannya:

- Hidup hemat dan sederhana
- menghormati hak milik orang lain
- Turut serta dalam keanggotaan koperasi, yang memiliki semboyan “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”, dimana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota.

3. Sosial budaya

Contoh penerapannya:

- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (PKK/RT/Karangtaruna/ Arisan/Pertemuan Rutin warga, dst)
- Ikut serta dalam gotong royong
- menjaga sarana umum.
- menjaga kebersihan.
- bergaul dengan teman tanpa memandang perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA)
- mengelola program budaya masyarakat
- menghormati lembaga sosial yang ada
- menjadikan demokrasi sebagai sebuah budaya

4. Pendidikan

Contoh penerapannya,

- Tekun dalam belajar
- Mengikuti pelajaran dengan rajin
- Mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor

5. Hukum

- Mematuhi hukum/aturan/tata tertib yang berlaku
- Berlaku adil terhadap siapapun
- menyadari berbagai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melaksanakannya dengan baik

6. Pertahanan keamanan

Contoh penerapannya:

- Menghormati kebhinekaan
- Menjaga ketertiban umum
- Turut serta kegiatan ronda/siskamling
- Tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian
- Melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi hal-hal yang mencurigakan di sekitar kita

Dari berbagai contoh di atas, Anda dapat mengembangkan contoh penerapan lainnya melalui perilaku kita sehari-hari. Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, maka Anda harus mengawalinya dengan menciptakan kehidupan demokratis mulai dari keluarga. Sebab apabila di keluarga sudah mampu mewujudkan kehidupan yang demokratis, maka akan terbentuk negara yang demokratis.

PENUGASAN 7.3.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 7.3, Anda diminta membuat komitmen untuk membangun kehidupan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sesuai format yang disiapkan

Tujuan

- ✓ Memiliki komitmen untuk membangun kehidupan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat.

Media

- ✓ Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 7.3: **Demokrasi sebuah pilihan**
- ✓ Cari dan baca materi dari sumber lain (internet/buku yang relevan)
- ✓ Buatlah tulisan tentang komitmen untuk membangun kehidupan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
- ✓ Tuangkan komitmen Anda ke dalam format sebagai berikut:

No	Komitmenku untuk membangun kehidupan demokratis		
	Untuk keluarga	Untuk masyarakat	Untuk bangsa dan negara
1
2
3	Dst	dst	dst

- ✓ Tulis atau ketik di kertas HVS Folio
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.

PENUGASAN 7.3.2

Petunjuk

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya.
2. Foto atau tulis di atas kertas dan serahkan kembali format yang sudah Anda isi kepada tutor

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Membiasakan diri bermusyawarah bersama teman-teman		
2	Menerima kekalahan dengan ikhlas		
3	Berani mengemukakan pendapat		
4	Memberi kesempatan teman lain untuk berpendapat		
5	Menguasai pembicaraan dalam kelompok		
6	Rela melaksanakan kegiatan yang telah disepakati		
7	Menyelesaikan masalah secara damai		
8	Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ide/gagasan sendiri		
9	Melawan pendapat teman lain yang dianggap keliru atau berbeda		
10	Berusaha mempertahankan pendapat sendiri agar diterima oleh teman lainnya		



Mari Kita Ingat Kembali

Demokrasi dalam pandangan Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktifitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakekatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.

Makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi penyelenggaraan negara berdasarkan kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintah. Demokrasi di Indonesia mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila, mulai sila ke-1 sampai dngan sila ke-5 Pancasila.

Perjalanan demokrasi ditandai pada masa revolusi kemerdekaan RI, elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Selanjutnya, periode kedua pemerintahan RI sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh Soekarno adalah sistem demokrasi Parlementer, kemudian pada sejak 5 Juli 1959 beralih menjadi demokrasi terpimpin yang akhirnya menyebabkan pergolakan gerakan 30 September 1965. Banyak penyimpangan yang terjadi pada masa itu, maka setelah keluarnya Supersemar 11 Maret 1966, bergantilah masa demokrasi Orde Lama menjadi Orde Baru. Orde Baru adalah suatu masa dimana rakyat berharap banyak terjadi perubahan politik yang signifikan, namun penyimpangan banyak terjadi diantaranya rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kebebasan pers dibatasi, dan pemilihan umum tidak berjalan terbuka dan adil. Dan pada puncaknya, melalui

gerakan Reformasi, rakyat dan mahasiswa bersatu menuntut presiden mundur, dan pada akhirnya, Wakil Presiden BJ. Habibie diangkat menjadi Presiden tahun 1998.

Demokrasi tetap menjadi sebuah pilihan karena demokrasi mengakui adanya persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan adanya kebebasan yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, segenap waga negara wajib berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang demokratis, mulai dari keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan bangsa serta negara.

Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian

Penugasan 7.1.1

Rubrik Penilaian : Laporan

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Sistematika laporan				
2	Kelengkapan laporan				
3	Kejelasan dan keruntutan penulisan laporan				
4	Kebenaran konsep yang dipaparkan dalam laporan				
Skor Perolehan					

Kriteria Penilaian:

1. Sistematika Laporan

Skor 4, jika sistematika laporan sangat sesuai

Skor 3, jika sistematika laporan sesuai

Skor 2, jika sistematika laporan cukup sesuai

Skor 1, jika sistematika laporan tidak sesuai

2. Kelengkapan Laporan

Skor 4, jika laporan sangat lengkap

Skor 3, jika laporan lengkap

Skor 2, jika laporan cukup lengkap

Skor 1, jika laporan tidak lengkap

3. Kejelasan Penulisan

Skor 4, jika laporan sangat jelas

Skor 3, jika laporan jelas

Skor 2, jika laporan cukup jelas

Skor 1, jika laporan tidak jelas

4. Kebenaran Konsep yang dipaparkan dalam laporan

Skor 4, jika konsep yang dipaparkan benar

Skor 3, jika konsep yang dipaparkan sebagian besar benar

Skor 2, jika konsep yang dipaparkan ada unsur benar

Skor 1, jika konsep yang dipaparkan salah

Keterangan Skor:

4 : bila laporan sangat tepat/sangat jelas/sangat lengkap/sangat rinci

3 : bila laporan cukup tepat/cukup jelas/cukup lengkap/cukup rinci

2 : bila laporan kurang tepat/kurang jelas/kurang lengkap/kurang rinci

1 : bila laporan tidak tepat/tidak jelas/tidak lengkap/tidak rinci

Cara Penilaian :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Penugasan 7.1.2

Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Makna Demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya.	0 – 20
2	Ciri demokrasi Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat (<i>law inforcement</i>) dan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah.	0 – 25

No	Jawaban	Skor
3	Prinsip demokrasi 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat 6. Menjamin tegaknya keadilan.	0 – 25
4	4 Makna penting demokrasi dengan <i>rule of law</i> adalah: <i>Pertama</i> , kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (<i>legal truth</i>) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. <i>Kedua</i> , kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (<i>legal justice</i>) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. <i>Ketiga</i> , kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (<i>legal security</i>) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. <i>Keempat</i> , kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (<i>legal interest</i>), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.	0 – 30
Jumlah Skor		100

Penugasan 7.2.1

Rubrik Penilaian : Tulisan

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Keruntutan penulisan				
2	Kelengkapan penulisan				
3	Kejelasan tulisan				
4	Ketepatan konsep yang dipaparkan dalam tulisan				
Skor Perolehan					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat runtut/sangat lengkap/sangat jelas/sangat tepat

3 : bila tulisan runtut/ lengkap/ jelas/ tepat

2 : bila tulisan kurang runtut/kurang lengkap/kurang jelas/kurang tepat

1 : bila tulisan tidak runtut/tidak lengkap/tidak jelas/tidak tepat

Penghitungan nilai :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Penugasan 7.2.2

Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. D |
| 2. B | 7. E |
| 3. B | 8. B |
| 4. C | 9. D |
| 5. C | 10. B |

Penugasan 7.3.1

Rubrik Penilaian : Tulisan tentang komitmen

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kesesuaian isi komitmen				
2	Kelengkapan komitmen				
3	Kejelasan komitmen				
4	Ketepatan konsep dalam membangun komitmen				
Skor Perolehan					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat sesuai/sangat lengkap/sangat jelas/sangat tepat

3 : bila tulisan sesuai/ lengkap/ jelas/ tepat

2 : bila tulisan kurang sesuai/kurang lengkap/kurang jelas/kurang tepat

1 : bila tulisan tidak sesuai/tidak lengkap/tidak jelas/tidak tepat

Penghitungan nilai :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Penugasan 7.3.2

Rubrik Skala Sikap

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Membiasakan diri bermusyawarah bersama teman-teman	✓	
2	Menerima kekalahan dengan ikhlas	✓	
3	Berani mengemukakan pendapat	✓	
4	Memberi kesempatan teman lain untuk berpendapat	✓	
5	Menguasai pembicaraan dalam kelompok		✓
6	Rela melaksanakan kegiatan yang telah disepakati	✓	
7	Menyelesaikan masalah secara damai	✓	
8	Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ide/gagasan sendiri	✓	
9	Melawan pendapat teman lain yang dianggap keliru atau berbeda		✓
10	Berusaha mempertahankan pendapat sendiri agar diterima oleh teman lainnya		✓

Petunjuk Penskoran skala sikap

Skor untuk pernyataan positif dengan pilihan jawaban YA memperoleh skor 1, sedangkan skor untuk pernyataan positif dengan pilihan jawaban TIDAK memperoleh skor 0

Skor untuk pernyataan negatif dengan pilihan jawaban TIDAK mendapatkan skor 1

akhir menggunakan skala 1 sampai 4, sedangkan skor untuk pernyataan negatif dengan pilihan jawaban TIDAK memperoleh skor 0

Perhitungan Skor :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh :

Skor diperoleh 5, skor tertinggi 10, maka $5 : 10 \times 100 = 50$

Peserta didik memperoleh nilai akhir:

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 80 – 100

Baik : apabila memperoleh skor 70 – 79

Cukup : apabila memperoleh skor 60 – 69

Kurang : apabila memperoleh skor < 60

KRITERIA PINDAH MODUL

Warga belajar dinyatakan tuntas dan dapat mempelajari modul berikutnya dengan ketentuan telah menyelesaikan tugas-tugas dan latihan dalam modul minimal 75.

Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi dengan membaca kembali uraian materi dalam modul, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana Anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

Selanjutnya Tutor akan melakukan penilaian berbasis modul untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.

Saran Referensi

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang Undang Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Daftar Pustaka

- Adyaksa Dault. 2012. *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa*. Jakarta: Renebook
- Achmad Sanusi. 2006. "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Bambang Suteng, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)*. Jakarta: Erlangga
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Dede Rosyada, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Minto Rahayu. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan. Perjuangan menghidupi jati diri bangsa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wuryan, Sri. & Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- <http://soal-soalpkn.blogspot.co.id/2015/06/bagaimana-cara-kerja-sistem.html>. Bagaimana Cara kerja sistem pemerintahan parlemen, dan Hal-hal negatif serta hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer? Diunduh tanggal 12 Mei 2018
- <https://mediakejujuran.wordpress.com/2012/06/28/demokrasi-indonesia/> Demokrasi Indonesia. Diunduh tanggal 13 Mei 2018
- <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/ciri-ciri-negara-yang-demokratis.html>. Ciri-ciri Negara yang Demokratis. Diunduh tanggal 12 Mei 2018
- [https://www.google.co.id \(gambar](https://www.google.co.id (gambar)

Glosarium

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1 | Linismasa | : | Alur waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas |
| 2 | Hakikat | : | Intisari, dasar, kenyataan yang sesungguhnya |
| 3 | Dalil-dalil | : | Keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran |
| 4 | petitum | : | Bagian surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan |
| 5 | dinamika | : | Gerak |
| 6 | Komitmen | : | Perjanjian untuk melakukan sesuatu |
| 7 | Diskriminasi | : | Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara |
| 8 | Sosialis | : | Filsafat seni yang dirancang oleh Lenin, yang tunduk pada kaidah komunis dan menggambarkan perjuangan kaum proletar melawan kaum borjuis |
| 9 | Substantif | : | Simpulan umum dalam bentuk sebab akibat yang tidak terikat oleh waktu dan tempat; |
| 10 | Krisis moneter | : | Krisis yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara; |
| 11 | Kontroversi | : | Perdebatan, pertentangan |
| 12 | Rotasi | : | Perputaran |
| 13 | Rekrutmen | : | Pengerahan |

